

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



**LURAH TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2024, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Kalurahan Tirtosari khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Kalurahan dan RKPKal, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Kalurahan Tirtosari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan menjadi Kalurahan terkemuka di wilayah selatan di Kabupaten Bantul, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

LURAH TIRTOSARI,

ISNAWAN, A.Ma.Pd

DAFTAR ISI

Sampul	
Pengantar	
Daftar Isi	
I. PENDAHULUAN	
I.1. Tujuan	
I.2. Visi Misi	
I.3. Strategi dan Kebijakan	
II. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TIRTOSARI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024	
II.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
II.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	
II.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	
II.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	
II.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	
II.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan	
A. Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024	
B. Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024	
II.7. Keberhasilan, Permasalahan dan Solusi	
III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Kalurahan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, meliputi aspek hukum, administrasi, maupun moral.

Pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan menjadi kewajiban pemerintah kalurahan sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah kalurahan.
2. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah kalurahan dalam kurun waktu satu tahun.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kalurahan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat pemerintah kalurahan beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
7. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

1.2 VISI dan MISI

Visi Lurah Tirtosari untuk 6 (enam) tahun mendatang (2022-2028) adalah **“TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIRTOSARI YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KALURAHAN TIRTOSARI YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA”**.

1. Visi tersebut mengandung arti dan pengertian bahwa pemerintah kalurahan Tirtosari berkeinginan mewujudkan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **ADIL** dalam arti dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik – baiknya.
- b. **MAKMUR** dalam arti masyarakat serba kecukupan.
- c. **SEJAHTERA** yang berarti kebutuhan dasar kalurahan Tirtosari telah terpenuhi secara lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut yang dimaksud adalah kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Adapun kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, nyaman terpenuhi hak asasi dan partisipasi, serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan pertanggungjawaban dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Kalurahan Tirtosari dalam RPJMKal Tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk penyelewengan.
3. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di segala bidang.
4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga.
5. Melestarikan dan menumbuhkembangkan tradisi seni dan budaya.
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.
7. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Mengoptimalkan sumber daya Pemuda Pemudi Tirtosari yang tergabung dalam wadah Karang Taruna untuk berperan aktif dalam Pembangunan di Kalurahan Tirtosari.

3. Nilai – nilai

Untuk mencapai Misi Kalurahan Tirtosari, maka nilai – nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

- a. Partisipatif (keterlibatan)
Setiap anggota masyarakat Tirtosari mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.
- b. Transparan (keterbukaan)
Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Tirtosari dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Demokratis
Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.
- d. Efektif dan Efisien
Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
- e. Berbudaya
Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahan senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

BAB II**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TIRTOSARI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024****II.1.PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN.**

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMKal TA 2022-2028 dan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll).
5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal.
6. Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam dll).
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa
9. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
10. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
11. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
12. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
13. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
14. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
15. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**)
17. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
18. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Kalurahan.
19. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif.
20. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan
21. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APB Kalurahan (regular).
22. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya (Musduk, Rembug Kalurahan Non Reguler).
23. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKP Kalurahan dll).
24. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll).
25. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan).
26. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat.
27. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.
28. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomkal.
29. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
30. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	Peraturan Perundangan – undangan	a. Peraturan Kalurahan	7
		b. Peraturan Lurah	4
		c. Peraturan Bersama Lurah	-
		d. Keputusan Lurah	57
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk :	
		1) Laki – laki	2.152
		2) Perempuan	2.235
		3) Jmlh Kepala Keluarga	1.645
		4) Jumlah jiwa	4.387
		b. Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan :	
		1) Pendidikan Umum	3.621
		2) Pendidikan Khusus	766
		c. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian :	
		1) Karyawan	
		a. PNS	65
		b. TNI/Polri	32
		c. Swasta	369
3	Pertanahan	2) Wiraswasta/pedagang	418
		3) Petani	1.263
		4) Buruh Perkebunan	1.182
		5) Buruh tani	347
		6) Pensiunan	90
		7) Nelayan	-
		8) Peternak	48
		9) Jasa	34
		10) Pengrajin	-
		11) Pekerja seni	-
		12) Tidak bekerja	325
		13) Lainnya	214
		a. Status Tanah	
		1) Sertifikat Hak Milik	-
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		4) Wakaf	-
		b. Luas Tanah	
		1) Bersertifikat	250.218 Ha
		2) Belum bersertifikat	-
		3) Tanah Kalurahan	191.145 Ha
		c. Peruntukan	
		1) Jalan	-
		2) Tanah ladang	-
		3) Bangunan umum	20.725 Ha
		4) Perumahan	-
		5) Ruang fasilitas umum	-
		d. Tanah yang belum di kelola :	
		1) Hutan	-

		2) Rawa	-
4	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan : 1) PNS 2) Non PNS	- 24
		b. Jumlah anggota Bamuskal	5
		c. Musyawarah Kalurahan	10
		d. Musrenbangkal	1
		e. Musyawarah Bamuskal	
5	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan LINMAS : 1) Jumlah anggota 2) Alat Pemadam Kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	42 1 -
		b. Ketentraman dan Ketertiban : 1) Jumlah Kejadian Kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) LPM- ada/tidak	- - - 18 ada
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan : 1) RT/RW – ada/tidak 2) LPMKal – ada/tidak 3) PKK- ada/tidak 4) Karang taruna- ada/tidak 5) Pos Pelayanan Terpadu - ada/tidak	ada (42) ada (1) ada (1) ada (1) ada (7)
		b. Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - ada/tidak	ada
		c. Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Kalurahan – ada/tidak	ada
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah – ada/tidak	ada

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, selain yang tertuang dalam RKP Kalurahan, maka bidang pemerintahan juga melaksanakan

pelayanan rutin kepada masyarakat berupa pelayanan bidang administrasi.

Berikut ini merupakan gambaran pelayanan kepada masyarakat:

No	Jenis Pelayanan	Pemohon (per 31 Des)
	Bidang Pemerintahan	
1.	Pengantar KTP	-
2.	Pindah Penduduk	79
3.	Legalisir	23
4.	Surat Keterangan	352
5.	Permohonan KK/C1	-
6.	Permohonan SKCK	-
7.	Penduduk Datang	66
8.	Kelahiran	27
9.	Kematian	41
10.	Pengantar Akte Kematian	41
	Bidang Pembangunan	
1.	Permohonan Kredit/Usaha	129
2.	Proposal Pembangunan	41
3.	IMB	-
4.	HO	-
5.	Pengeringan tanah	-
	Bidang Pelayanan	
1.	Surat Keterangan Tidak Mampu	97
2.	Nikah	
	- Laki-laki	21
	- Perempuan	28
3.	Cerai	4
4.	Lain-lain (penghasilan orang tua,dll)	-

II.2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMKal TA 2022-2028 dan RKPKal TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan.
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Mayarakat
4. Dukunan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/berprestasi
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif).
6. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga kerja dan Kader Kesehatan dll).
7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga (BKB).
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PDK
9. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat.
10. Pembinaan Kampung KB
11. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.

12. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
13. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
15. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
17. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
18. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan sampah
19. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah ada/tidak ya/tidak
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan (km)	8 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (km)	2 km
		c. Jalan Propinsi (km)	1 km
		d. Jalan Negara (km)	-
		e. Jembatan (buah)	ada (6 bh)
		f. Kantor Lurah (ada/tidak)	ada (1)
2	Pembangunan Pendidikan	a.Tempat pendidikan Tempat Pendidikan Umum :	
		1) Kelompok bermain (jumlah)	7
		2) Taman Kanak-kanak (jumlah)	2
		3) Sekolah Dasar (jumlah)	2
		4) Sekolah Menengah Pertama (jumlah)	-
		5) Akademi (jumlah)	-
		6) Institut/Sekolah Tinggi (jumlah)	-
		7) Universitas	-
		b.Tempat Pendidikan Khusus :	
		1) Pendidikan pesantren (jumlah)	1
		2) Madrasah (jumlah)	-
		3) Sekolah Luar biasa (jumlah)	-
		4) Balai Latihan Kerja (jumlah)	-
		5) Kursus – kursus (jumlah)	1
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (jumlah)	-
		d. Rumah Sakit Mata (jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (jumlah)	-

		g. Rumah Bidan (jumlah)	-
		h. Pustu (jumlah)	1
		i. Apotek (jumlah)	-
4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olah Raga : 1) Lapangan Umum (jumlah) 2) Lapangan Khusus (jumlah) b. Sarana : Kesenian/Budaya 1) Gelangang Remaja (jumlah) 2) Gedung Kesenian (jumlah) 3) Gedung Teater (jumlah) 4) Gedung Bioskop (jumlah) c. Sarana Sosial : 1) Panti Asuhan (jumlah) 2) Panti Pijat Tunanetra (jumlah) 3) Panti Wreda (jumlah) 4) Panti Jompo (jumlah) d. Sarana Komunikasi : 1) Radio Komunikasi (jumlah) 2) Papan Pengumuman (jumlah)	1 4 - - - - - - - 1 7

II.3. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMKal TA 2022-2028 dan RKP Kalurahan TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan.
3. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
5. Pembinaan Bidang Keagamaan
6. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan.
7. Pembinaan PKK.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa (berapa kali) 2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 (berapa kali) 3) Peraturan Menteri tentang Desa (berapa kali)	- - -

		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah : 1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kalurahan (berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Kalurahan (berapa kali)	-	-
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan : 1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan (berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Lurah (berapa kali) 3) Sosialisasi Peraturan bersama Lurah (berapa kali)	7	4
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi pelaksanaan Hak dan kewajiban masyarakat (berapa kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan (ada/tidak) c. Masyarakat menyampaikan informasi dan pelayanan yang adil (ada/tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (ya/tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan (ya/tidak)	2	ada ada ya ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (berapa kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (berapa kali) c. Sosialisasi mengenai kenyamanan dan ketertiban masyarakat(berapa kali) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (berapa kali) e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (berapa kali) f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan (berapa kali)	10	- - 21 - -
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (jumlah) b. Majelis Gereja (jumlah) c. Majelis Budha (jumlah) d. Majelis Hindu (jumlah) e. Remaja Masjid (jumlah) f. Remaja Gereja (jumlah) g. Remaja Budha (jumlah) h. Remaja Hindu (jumlah)	14	- - 1 14 - - 1
5	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (jumlah)	-	-

		b. Penampung pekerja keluar negeri (jumlah)	
--	--	---	--

II.4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMKal TA 2022-2028 dan RKPKal TA 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
5. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
6. Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat/Kader Lainnya
7. Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif.
8. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
9. Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (berapa kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (berapa kali)	1
		c. Bidang Politik (berapa kali)	2
		d. Bidang Lingkungan (berapa kali)	21
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (berapa kali)	-
		b. Pemberdayaan Pemuda (berapa kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah Raga (berapa kali)	2
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (berapa kali)	-
3	Pengalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (berapa kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (berapa kali)	7

II.5.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMKal TA 2022-2028 dan RKPKal TA 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana.
2. Penanganan Keadaan Mendesak.

II.6. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN.

Secara garis besar, gambaran umum APBKal Tahun Aggaran 2024 sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 3.187.160.200,-

2. Belanja Kalurahan;	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal.	Rp. 1.632.848.625,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 920.004.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.800.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 347.498.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 375.774.440,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.357.925.065,-</u>
Surplus/ Defisit	Rp. 170.764.865,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 170.764.865,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 170.764.865,-

sesudah perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.372.808.878,-
2. Belanja Kalurahan;	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal.	Rp. 1.742.231.303,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.035.627.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.800.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 552.915.440,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 131.000.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.543.573.743,-</u>
Surplus/ Defisit	Rp. 170.764.865,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 170.764.865,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 170.764.865,-

II.7. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Dalam melaksanakan tata pemerintahan selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2024, Pemerintah Kalurahan telah berupaya maksimal melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPKal Tahun Anggaran 2024 dan APBKal Tahun Anggaran 2024. Meskipun pada realisasi pelaksanaannya terdapat beberapa kendala teknis sehingga beberapa kegiatan ada yang tidak tepat dari yang direncanakan, atau ada kegiatan mendadak yang mau tidak mau harus dilaksanakan.

Perjalanan tata pemerintahan kalurahan, tidak terlepas dari anggaran baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), PBH maupun yang bersumber dari APBN (Dana Desa) dan APBD (ADD) Tahun 2024, dalam penyusunan anggaran mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024, gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana (Rp)
	PENDAPATAN	
1	Hasil Usaha Kalurahan	4.400.000,-
2	Hasil Aset Kalurahan	190.009.500,-
3	Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan	11.250.000,-
4	Dana Desa	1.359.691.000,-
5	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	235.228.400,-
6	Alokasi Dana Desa	939.581.300,-
7	Bantuan Keuangan Provinsi	-
8	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	440.000.000,-
9	Pendapatan Lain – lain	7.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	3.187.160.200,-
	BELANJA	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal.	1.632.848.625,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	920.004.000,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	81.800.000,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	347.498.000,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	375.774.440,-
	Jumlah Belanja	3.357.925.065,-
	Defisit	170.764.865,-
	PEMBIAYAAN KALURAHAN	
1	Penerimaan pembiayaan	170.764.865,-
2	Pengeluaran pembiayaan	-
	Selisih pembiayaan (a-b)	170.764.865,-

2. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Februari 2025 secara ringkas pertanggungjawaban anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
	PENDAPATAN		
1	Hasil Usaha Kalurahan	4.400.000,-	5.531.650,-
2	Hasil Aset Kalurahan	190.009.500,-	203.608.170,-
3	Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan	11.250.000,-	11.250.000,-
4	Dana Desa	1.359.691.000,-	1.504.207.000,-
5	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	235.228.400,-	260.230.758,-
6	Alokasi Dana Desa	939.581.300,-	939.581.300,-
7	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-
8	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	440.000.000,-	440.000.000,-
9	Pendapatan Lain – lain	7.000.000,-	8.400.000,-
	Jumlah Pendapatan	3.187.160.200,-	3.372.808.878,-
	BELANJA		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.632.848.625,-	1.742.231.303,-

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	920.004.000,-	1.035.627.000,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	81.800.000,-	81.800.000,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	347.498.000,-	552.915.440,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	375.774.440,-	131.000.000,-
	Jumlah Belanja	3.357.925.065,-	3.543.573.743,-
	Defisit	170.764.865,-	101.719.864
	PEMBIAYAAN KALURAHAN		
1	Penerimaan pembiayaan	170.764.865,-	
2	Pengeluaran pembiayaan	0,-	-
	Jumlah Pembiayaan Kalurahan	170.764.865,-	
	Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran	0	170.764.865,-

Secara sepintas terlihat, bahwa pendapatan untuk tahun 2024 target pendapatan lebih dari 100%, karena penerimaan asli kalurahan dan pendapatan lain – lain yang sah melampaui dari target yang ditetapkan.

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta upaya yang ditempuh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Tirtosari, dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Kode Rek	Kegiatan	Keberhasilan (%)	Masalah	Upaya yang ditempuh
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah.	100	-	-
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan.	100	-	-
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.	68.02	Ada yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial	Memaksimal kan anggaran yang ada
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll).	81.35	-	-
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	100	-	-
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam dll).	84.27	-	-
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.	99.37	-	-
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	76.22	-	-
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	100	-	-

1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	100	-	-
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan	100	-	-
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	100	-	-
1.1.98	Penyediaan Penghasilan Bagi Staf Honorer	100	-	-
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	100	-	-
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	100	-	-
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**)	100	-	-
1.3.02	Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Kalurahan.	52.94	Hanya digunakan dengan menyesuaikan tahapan dan sisa anggaran menjadi SILPA tahun berikutnya	Memaksimalkan anggaran dan kegiatan
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	100	-	-
1.3.94	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	3.68	Belum menemukan pihak ketiga yang sesuai dengan anggaran	Menjadi SILPA dan dianggarkan ditahun berikutnya
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APBKal (reguler).	81.35	-	-
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musduk, Rembug Kalurahan Non Reguler).	100	-	-
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll).	97.53	-	-
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan , LPJ dll).	95.36	-	-
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/ Keuangan).	80.71	-	-
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat.	88.22	-	-

1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.	86.00	-	-
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dalam Lomkal.	85.71	-	-
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	92.75	-	-
1.5.90	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	0	Ada anggaran untuk pengganti TKD	Mencari pengganti TKD disesuaikan dengan anggaran yang ada
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	92.60	-	-

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr asah Non Formal Milik Kalurahan.	83.54	-	-
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	100	-	-
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	100	-	-
2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	99.75	-	-
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	94.02	-	-
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll).	89.73	-	-
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	99.88	-	-
2.2.09	Pembangunan/Rehabilit asi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	100	-	-
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	100	-	-
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	96.91	-	-
2.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	100	-	-
2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	93.04	-	-

2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	100	-	-
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	Situasi tidak memungkinkan karena curah hujan yang tinggi	Menjadi SILPA dan dilanjutkan ditahun berikutnya
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan.	100	-	-
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	100	-	-
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100	-	-
2.5.91	Pelatihan Pengelolaan/Pengelolaan Sampah	100	-	-
2.5.93	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	100	-	-

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	100	-	-
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	98.33	-	-
3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	62.69	Hanya digunakan menyesuaikan dengan tahapan dan sisa anggaran menjadi SILPA tahun berikutnya	Memaksimalkan anggaran dan kegiatan
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	85.63	-	-
3.2.90	Pembinaan di bidang Keagamaan	100	-	-
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	70.88	Hanya digunakan menyesuaikan dengan tahapan dan sisa anggaran menjadi SILPA tahun berikutnya	Memaksimalkan anggaran dan kegiatan
3.4.03	Pembinaan PKK	98.26	-	-

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100	-	-
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100	-	-
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	99.80	-	-
4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	88.70	-	-
4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	99.14	-	-
4.3.90	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat/Kader Lainnya	100	-	-
4.4.92	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif.	76.66	-	-
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.	99.93	-	-
4.6.01	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	86.67	-	-

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT MENDESAK KALURAHAN

5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana.	0	Karena tidak terjadi bencana	-
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak.	100	-	-

F. PEMBIAYAAN KALURAHAN

6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100	-	-
-------	--	-----	---	---

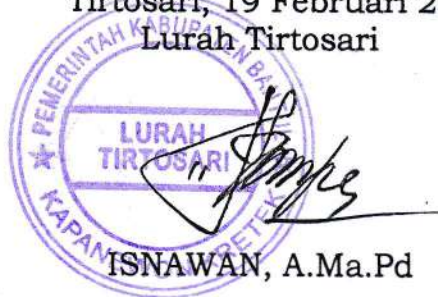
**BAB III
PENUTUP**

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran. Saat ini sumber pendapatan Pemerintahan Kalurahan adalah anggaran dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa Bantuan Kinerja dan Infrastruktur, APBD Kabupaten Bantul salah satunya Dana Bagian Kalurahan dari Hasil Pendapatan Daerah berupa ADD, serta PADes. Maka sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Bantul akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat;
2. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku pemangku kebijakan provinsi;
3. Bapak Bupati Bantul, selaku pemangku kebijakan daerah;
4. Bapak Panewu Kretek, selaku pembina;
5. Ketua Bamuskal Tirtosari, selaku pengawas kegiatan;
6. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Tirtosari dan segenap instansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Kalurahan Tirtosari.

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukan untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Tirtosari, 19 Februari 2025
Lurah Tirtosari



ISNAWAN, A.Ma.Pd